

INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK TAIWAN-TIONGKOK TAHUN 2022-2024

Daniel Yogianto¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The post-World War II conflict that occurred was an ideological conflict. This ideological conflict did not only occur for 2 major actors, namely the United States and the Soviet Union, its impact could be felt in other countries. This conflict occurred in many regions and one of them was in China. China's attitude tends to be aggressive because it is based on its goal, namely to achieve the One China Policy. This goal contains China's ambition to unite the Taiwan region so that it is under Chinese rule, so that there is only one government in power. This goal has an impact on activities and interaction patterns in the international environment. The policy of political isolation is one of the ways carried out by the Chinese government to restrain Taiwan in the international environment. One form is the severance of relations between China and countries related to Taiwan, such as the United States. In conducting identification and analysis, this study applies a neo-realism approach, the concept of national interest. Through research conducted using qualitative methods, this study shows that differences in interests and political orientations between the US and China allow for conflict between the two countries. Based on the above considerations, the United States feels the need to maintain the stability of the Asia Pacific region in general and Taiwan in particular.

Keywords: China-Taiwan Conflict, One-China Policy, United States Intervention, US-Taiwan Cooperation

ABSTRAK

Konflik pasca Perang Dunia II yang terjadi adalah konflik ideologi. Konflik ideologi ini tidak hanya terjadi bagi 2 aktor besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, dampaknya dapat dirasakan hingga ke negara-negara lain. Konflik ini terjadi di banyak wilayah dan salah satunya adalah di daerah Tiongkok. Sikap Tiongkok cenderung agresif karena didasari atas tujuannya yaitu untuk mencapai *One China Policy*. Tujuan tersebut berisikan mengenai ambisi Tiongkok dimana menyatukan daerah Taiwan sehingga berada dibawah pemerintahan Tiongkok, sehingga hanya ada satu pemerintahan saja yang berkuasa. Tujuan tersebut berdampak pada kegiatan dan pola interaksi di lingkungan internasional. Kebijakan politik isolasi menjadi salah satu cara yang dijalankan oleh pemerintahan Tiongkok untuk mengekang Taiwan di lingkungan internasional. Salah satu bentuknya adalah pemutusan hubungan antara Tiongkok dengan negara yang berhubungan dengan Taiwan seperti salah satunya adalah Amerika Serikat. Dalam melakukan identifikasi dan analisis, penelitian ini menerapkan pendekatan neo-realisme, konsep kepentingan nasional. Melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Perbedaan kepentingan dan orientasi politik antara AS dan China memungkinkan terjadinya konflik antarkedua negara. Berdasarkan pertimbangan di atas, Amerika Serikat merasa perlu untuk menjaga stabilitas wilayah Asia Pasifik umumnya dan Taiwan khususnya.

Kata Kunci: Konflik Tiongkok-Taiwan, *One-China Policy*, Intervensi Amerika Serikat, Kerjasama AS-Taiwan

PENDAHULUAN

Salah satu penyebab Perang Dunia II berasal dari sektor ekonomi dimana terjadinya fenomena *Great Depression*. *Great Depression* merupakan peristiwa terburuk dalam sektor ekonomi dunia dan berlangsung dari tahun 1929-1939 (History.com, 2021). Peristiwa itu mengurangi perdagangan global sebesar 25%. Di Jerman, peristiwa ini berdampak besar sehingga angka pengangguran sebesar 30%. Disisi lain, pergerakan komunis terlihat sangat aktif. Dengan menganggap hal ini sebagai ancaman, pemerintah Jerman berniat memblokir pergerakannya dengan bergabung dengan gerakan NAZI. Namun Hitler berkhianat dengan memanfaatkan kekuasaan penuhnya sebagai seorang diktator (Amadeo, 2021).

Banyak negara mengalami kerugian besar dalam bidang ekonomi. Setelah mengalami *Great Depression*, negara-negara harus menghadapi peristiwa besar berupa Perang Dunia II. Hal ini tentu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Amerika Serikat sebagai pemenang perang hanya mengalami kerusakan di Hawaii dan beberapa markas militer perairan. Maka dari itu, Amerika Serikat tidak perlu berfokus dalam pemulihan infrastruktur dan dapat berfokus pada pemulihan sektor ekonomi nasional. Berbeda dengan negara-negara yang ada di Eropa. Banyak dari negara tersebut mengalami kerusakan infrastruktur yang sangat besar. Maka dari itu, mereka harus memulihkan infrastruktur terlebih dahulu untuk memfasilitasi rakyatnya. Setelah itu, barulah tiap negara bisa berfokus pada sektor ekonomi nasional (Boyte, 2020).

Setelah itu, konflik yang kemudian terjadi adalah konflik ideologi ini tidak hanya terjadi bagi 2 aktor besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, dampaknya dapat dirasakan hingga ke negara-negara lain. Konflik ini terjadi di banyak wilayah dan salah satunya adalah di daerah Tiongkok. Pada tahun 1946, Chiang Kai-Shek sebagai penguasa Tiongkok Daratan pada akhirnya mampu melawan serta mengakhiri penjajahan Jepang yang sudah terjadi selama 50 tahun (BBC News Taiwan Timeline, 2021). Namun setelah Chiang Kai-Shek berkuasa dan mengambil kontrol atas segala peninggalan Jepang, keadaan Tiongkok tidak membaik. Terdapat banyak korupsi dibawah pemerintahan Chiang Kai-Shek. Salah satu kasus terbesar dan menjadi puncak peristiwa saat itu adalah dimana Chiang Kai-Shek memerintahkan pembunuhan atas hampir 300.000 jiwa penduduk asli di Pulau Formosa yang dikenal dengan *White Terror* pada 28 Februari 1947. Hal ini dilakukan Chiang Kai-Shek semata-mata sebagai kontrol atas pelaku demonstrasi terhadap pemerintah sekaligus pembersihan anggota partai komunis di daerah tersebut (BBC News Taiwan Timeline, 2021).

Anggota Partai Kuomintang pada akhirnya dibawa oleh Chiang Kai-Shek untuk mengungsi dengan seluruh pasukan yang tersisa (BBC News, 2018). Rencana Chiang Kai-Shek pun tidak berjalan mulus, dimana Partai Komunis Tiongkok terus melakukan intervensi dan konfrontasi terhadap Chiang Kai-Shek. Proses pelarian pertama adalah menuju Kepulauan Yijiangshan setelah Partai Komunis Tiongkok menyerang daerah Tanchen yang menjadi tempat evakuasi pertama Chiang Kai-Shek. Peristiwa ini dikenal dengan Krisis Selat Taiwan Pertama. Saat itu Chiang Kai-Shek meminta bantuan Amerika Serikat dibawah pemerintahan Dwight D. Eisenhower. Dan pada peristiwa ini, terbentuk *Mutual Defense Treaty* antara Chiang Kai-Shek dengan pemerintahan Eisenhower (Global Security, 2021).

Setelah itu terdapat Krisis Selat Taiwan Kedua. Pada saat itu, Chiang Kai-Shek dan pengikutnya tengah berdiam di kepulauan Matsu dan Quemoy. Partai Komunis Tiongkok

dibawah pemerintahan Mao Zedong menyerang kepulauan tersebut, dan pada akhirnya Chiang Kai-Shek dipukul mundur dan terpaksa untuk berdiam di kepulauan Formosa (The Diplomat, 2015). Proses evakuasi ini pun turut dibantu oleh pihak Amerika Serikat. Hal ini dilakukan Amerika Serikat karena tidak suka atas tindakan Tiongkok yang memiliki ideologi komunisme dan bersekutu dengan Uni Soviet (Kuntic, 2015). Setelah menempati wilayah baru tersebut, Chiang Kai-Shek pun berencana membangun negara yang tidak satu bendera dengan Partai Komunis Tiongkok sejak tahun 1950-an.

Sikap Tiongkok yang cenderung agresif ini didasari atas tujuannya yaitu untuk mencapai *One China Policy*. Tujuan tersebut berisikan mengenai ambisi Tiongkok dimana menyatukan daerah Taiwan sehingga berada dibawah pemerintahan Tiongkok, sehingga hanya ada satu pemerintahan saja yang berkuasa. Tujuan tersebut berdampak pada kegiatan dan pola interaksi di lingkungan internasional. Kebijakan politik isolasi menjadi salah satu cara yang dijalankan oleh pemerintahan Tiongkok untuk mengekang Taiwan di lingkungan internasional. Salah satu bentuknya adalah pemutusan hubungan antara Tiongkok dengan negara yang berhubungan dengan Taiwan seperti salah satunya adalah Amerika Serikat.

Pada sidang PBB tahun 1971, sidang tersebut menetapkan Resolusi 2758 dimana pemulihan hak dari Republik Rakyat Tiongkok dan pengeluaran Pemerintahan Nasionalis Taiwan dari keanggotaan PBB (United Nations General Assembly Session 26 Resolution 2758). Tindakan yang dilakukan Amerika Serikat sebagai pelindung Taiwan ditunjukkan dari komitmennya dalam urusan pemasok senjata. Sejak masa pemerintahan Jimmy Carter hingga George W. Bush, Amerika Serikat terus memasok senjata ke Taiwan. Tindakan ini dilakukan Amerika Serikat bukan hanya untuk memenuhi kepentingannya pada bidang ekonomi saja. Namun, hal ini dilakukan sebagai usahanya dalam menekan ancaman kekuatan dari Tiongkok di kawasan Asia.

Hal ini tentu menjadi ancaman besar bagi Amerika Serikat yang mana merupakan kiblat ekonomi dunia pasca Perang Dingin. Pada dasarnya, tentu kepentingan Amerika Serikat merupakan untuk penguatan ekonomi, keamanan, dan strategi di kawasan Asia. Namun atas dasar pertumbuhan Tiongkok yang sangat pesat, Amerika Serikat perlu berjaga sekaligus menekan kekuatan Tiongkok yang bisa saja berkembang menjadi hegemoni tak hanya di salah satu benua, tetapi seluruh dunia. Tak hanya itu, kepentingan lain Amerika Serikat adalah tujuannya dalam menyebarkan paham demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Peran Amerika Serikat sebagai pelindung Taiwan merupakan batu loncatan Amerika Serikat dalam mencapai kepentingannya di lingkungan internasional.

KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Perspektif Neorealisme atau Realisme Struktural sebagai pisau analisis utama. Kenneth Waltz sendiri mengatakan bahwa hubungan yang terjadi di lingkungan internasional berawal dari struktur dan berdampak pada terbentuknya berbagai kebijakan dari berbagai aktor hubungan internasional (Johari, 1985, p. 91).

Berdasarkan tiga konsep dari Kenneth Waltz, yakni *Organizing Principle*, *Functional Differentiation*, dan *Distribution of Capability*. Dimana dalam penelitian ini akan berkaitan erat dengan berkaitan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konflik Taiwan

dengan Tiongkok dimana Tiongkok memberlakukan politik isolasi terhadap Taiwan. Kepentingan nasional dari Amerika Serikat tersebut adalah berkaitan dengan dominasi ataupun hegemoni. Kondisi ini berkaitan dengan struktur internasional saat ini dimana Tiongkok telah menjadi entitas baru untuk negara *Super Power*.

Perspektif Neorealisme menurut Kenneth Waltz ini menjelaskan bagaimana negara sebagai aktor utama hubungan internasional masih dapat memungkinkan adanya pola hubungan kerjasama di lingkungan internasional yang bersifat anarki selagi masih ada *relative gain* bagi negara tersebut. Dalam hal ini Amerika Serikat yang melakukan kerjasama dengan Taiwan menunjukkan bahwa adanya *relative gain* yang didapatkan oleh Amerika Serikat dan tentu lebih diuntungkan demi kepentingan nasionalnya.

Serta penggunaan konsep-konsep turunan lainnya, yakni kepentingan nasional. Menurut Nuchterlein, kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara entah itu berkaitan dengan kondisi ekonomi, pertahanan, politik, dan yang lainnya. Namun, konsep kepentingan nasional menurut Nuchterlein tersebut tak hanya bergerak linear seperti itu. Kepentingan nasional pun bisa tercipta dari ambisi negara dalam meningkatkan kapabilitasnya entah itu militer, ekonomi, politik, ataupun yang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan dan melihat sebab-sebab dari sebuah gejala tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan hasil.

PEMBAHASAN

Kondisi Tiongkok pasca perang dunia II menimbulkan perebutan pengaruh dari kepentingan asing antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat membantu kepentingan kaum nasionalis berusaha menjadikan bentuk negara agar tidak jatuh ke komunis dan Uni Soviet membantu kaum komunis untuk melakukan perebutan kekuasaan. Salah satu perkembangan setelah berakhirnya Perang Dunia II yaitu adanya pertentangan antara ideologi komunis dan demokrasi liberal. Berdirinya negara komunis di China ternyata akan mempengaruhi perkembangan dunia, khususnya Asia Timur. Uni Soviet sebagai salah satu negara pemenang dalam Perang Dunia II dengan cepat menggunakan dan menciptakan peluang untuk memperbesar pengaruhnya baik di barat, timur maupun ke selatan. Mode perkembangan ini jelas mengelisahkan Barat pimpinan Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat merasa berkewajiban untuk mencegah berkembangnya gerakan komunis. Maka disusunlah kemudian strategi politik globalnya yang dikenal dengan istilah Containment Policy, yang berarti suatu politik bertujuan mencegah berkembangnya pengaruh suatu negara atau suatu sistem politik dari pihak lawan agar pengaruh komunisme tidak meluas.

A. Peranan Amerika Serikat dalam Konflik Tiongkok-Taiwan

Dalam konteks hubungan Tiongkok-Taiwan, AS disini melihat Tiongkok sebagai Major Threat bagi keamanan di Asia Pasifik. Kebangkitan China ini telah menghasilkan ikatan yang unik dengan AS. Keseimbangan yang kompleks antara kedua negara menghasilkan pola interaksi ketergantungan dan kepentingan yang berbeda. Pertama, kebangkitan China telah menyebabkan pembaruan dan peningkatan kolaborasi kestabilan tatanan dunia antara AS dan China yang telah membuahkan hasil pada sejumlah isu global khususnya dalam aspek ekonomi dan perdagangan. Kedua, kebangkitan China telah meningkatkan ketakutan dan ancaman.

Perbedaan kepentingan dan orientasi politik antara AS dan China memungkinkan terjadinya konflik antarkedua negara. Berdasarkan pertimbangan di atas, Amerika Serikat merasa perlu untuk menjaga stabilitas wilayah Asia Pasifik umumnya dan Taiwan khususnya. Konflik penyeberangan di selat Taiwan antara Tiongkok-Taiwan terjadi pertama kali pada tahun 1954-1955, krisis penyeberangan Selat Taiwan kedua terjadi pada tahun 1958. Krisis selat Taiwan juga terjadi pada tahun tahun 1962. Pada krisis pertama RRC menyerang Republik China yang pada saat itu berada di Kepulauan Yijiangshan, dan memaksa Republik China untuk meninggalkan Kepulauan Tachen, yang pada akhirnya RRC berhasil menguasai wilayah tersebut. Amerika Serikat, yang memang tak menyukai rezim komunis China bersekutu dengan Uni Soviet (Rusia) yang menjadi musuh AS saat perang dingin, melihat begitu besarnya pengaruh China akhirnya memutuskan untuk bersekutu dengan Republik China dan membantu mengevakuasi personel militer Republik China dari Tachen ke Formosa (Taiwan). Meski berakhir dengan gencatan senjata, krisis ini akhirnya berlanjut ke krisis selanjutnya di selat yang sama. Pasca terjadinya krisis ini AS membuat suatu perjanjian dengan pihak Chiang KaiShek (Taiwan) yaitu Mutual Defence Treaty (MDT).

Krisis Selat Taiwan kedua 1958 merupakan serangan RRC terhadap Republik China (Taiwan). Selang beberapa tahun, intimidasi di kepulauan kecil di tengah selat tersebut kembali berlanjut. Kala itu, Kai-Shek dan pengikutnya masih mendiami kepulauan Matsu dan Quemoy. China akhirnya menggempur kedua kepulauan tersebut dan memukul pasukan Chiang Kai-Shek sehingga mundur dan menetap di Formosa (Taiwan sekarang) sampai sekarang. Untuk meningkatkan kemandirian militer Taiwan, AS juga giat melakukan penjualan alutsista ke pihak Taiwan hingga sekarang.

Tindakan yang pada gilirannya mengundang protes dari pihak RRC. Pada tahun 1954 di saat perang dingin berlangsung tepatnya setelah perang Korea usai, AS dan Taiwan membuat suatu perjanjian yang sebelumnya pada saat itu AS membantu Kuomintang beserta pengikutnya dalam pelarian dari RRC dan membantu melawan serangan dari RRC. Di lain pihak AS juga menjaga hubungan dengan China karena kepentingan ekonomi dan politik. China melalui Shanghai Communiqué pada tanggal 28 Pebruari 1972 yang berisi Amerika Serikat mengakui bahwa baik Taipei dan Beijing sepakat bahwa hanya ada satu China. Dengan adanya perjanjian ini menggerogoti hubungan diplomatik antara AS dan Taiwan. AS membangun hubungan diplomatik dengan China, tetapi juga berkomitmen untuk membantu pertahanan Taiwan. AS mendukung kebijakan “satu China”, dengan Beijing sebagai pemerintah yang sah, di lain pihak menjalin hubungan perdagangan dan militer dengan

Taipei. Tiga bulan setelah normalisasi hubungan AS-China, pada 10 April 1979 AS-Taiwan menandatangani Perjanjian Taiwan Relations Act (TRA).

Bersandar pada Taiwan Relations Act (TRA) yang telah berlaku sejak 1979, AS merasa berkewajiban untuk membantu dan melindungi Taiwan. Karena itu, AS tidak pernah berhenti menyalurkan bantuan ekonomi dan militer ke Taiwan. Tercatat selama 3 dekade setelah TRA diimplementasikan (1980-2010), AS telah menjual senjata ke Taiwan sebesar 25,39 miliar USD (Arms Control Association 2012). Ketika memperingati 35 tahun TRA pada 9 April 2022, 52 senator AS mengirimkan surat desakan kepada Presiden Barack Obama untuk terus meningkatkan bantuan kepada Taiwan karena *“helping Taiwan make further meaningful contributions in the region is in the interest of the United States and in line with the spirit of the TRA”*.

Masalah Taiwan makin sulit dan rumit dimana AS memainkan dua sisi yang berbeda di satu sisi AS mengakui one-China policy sesuai Shanghai Communique, tetapi di sisi lain AS berkewajiban melindungi Taiwan berdasarkan amanat TRA. Melalui TRA, AS tetap menjalin hubungan perdagangan, kebudayaan dan berbagai hubungan yang tidak resmi lainnya. Di bawah TRA, AS menjalankan kebijakan: (1) Memelihara dan mengembangkan hubungan kultural, perdagangan dan lainnya secara ekstensif dan bersahabat di antara AS dan rakyat Taiwan, (2) Mendeklarasikan perdamaian dan stabilitas di area kepentingan politik, keamanan dan ekonomi AS dan di area yang menjadi perhatian internasional, (3) Memperjelas masa depan Taiwan akan ditentukan oleh cara-cara damai; menganggap bahwa usaha-usaha yang menentukan masa depan Taiwan, selain cara-cara damai, termasuk boikot atau embargo, merupakan ancaman keamanan dan perdamaian bagi negara-negara Pasifik Barat dan menjadi perhatian penting bagi AS, (4) Menyediakan persenjataan defensive untuk Taiwan, (5) Meyakinkan hak untuk melawan segala macam bentuk serangan atau koersi yang akan mengancam keamanan atau sistem ekonomi dan sosial rakyat Taiwan. Menyikapi pengesahan TRA, China menyampaikan keberatannya dan mempertanyakan komitmen AS. Meski marah, namun Beijing tetap menjaga diri untuk tidak memperkeruh situasi berubah menjadi konflik terbuka.

Hal lain yang perlu dikemukakan bahwa dalam National Defense Strategy tahun 2008, AS memberikan perhatian khusus terhadap modernisasi militer China, yang secara khusus ditujukan kepada kemungkinan konflik dengan Taiwan. Demikian halnya dalam National Security Strategy tahun 2010, AS akan terus memonitor program modernisasi militer China dan bersiap untuk memastikan bahwa kepentingan dan sekutu-sekutunya, dalam lingkup regional atau global, tidak terkena dampak negatif dari program China tersebut,

China dan Taiwan saat ini dinilai sedang mengalami ketegangan terburuk dalam waktu 40 tahun terakhir. Konflik yang berkepanjangan ini, berawal dari runtuhnya pemerintahan Republik Tiongkok di daratan China (1912– 1949) yang dimulai dengan kejadian perang saudara antara Republik Tiongkok yang berhaluan nasionalis dengan Partai Komunis Tiongkok, dan diakhiri dengan gencatan pertempuran militer besar, dengan hasil Partai Komunis Tiongkok menguasai China daratan, sedangkan yurisdiksi Republik Tiongkok (Taiwan) berkuasa di beberapa pulau yang sekarang disebut sebagai Taiwan. China, dengan kekuatan militernya, diperkirakan akan dengan mudah menguasai Taiwan. Namun demikian,

perlu juga dipertimbangkan hal lainnya oleh China ketika merencanakan akan melakukan agresi militer ke Taiwan. Hal tersebut adalah kehadiran AS, yang bisa dipastikan tidak akan tinggal diam jika agresi militer China ke Taiwan benar-benar terjadi. Keberadaan Taiwan Relations Act 1979 memberi ruang bagi AS untuk membantu Taiwan jika terjadi konflik terbuka.

B. Hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok

Sejarah hubungan Tiongkok-AS dalam isu Taiwan berawal dari dukungan AS kepada pemerintahan Nasionalis dalam menghadapi agresi Jepang ke Tiongkok Daratan pada awal 1940-an. Pada waktu yang sama, Tiongkok Daratan sedang dilanda perang saudara antara kubu Nasionalis dan Komunis. Meskipun AS mengetahui betapa korupnya pemerintahan Nasionalis yang tidak didukung sebagian besar rakyat Tiongkok, tetapi demi alasan ideologis, AS tetap menopangnya untuk menangkai penyebaran paham komunis. Karena itu, ketika Revolusi Komunis berhasil menumbangkan pemerintahan Nasionalis dan membentuk Republik Rakyat China (RRC) pada 1949, AS memutuskan untuk menyokong pemerintahan baru yang dibentuk kubu Nasionalis di Taiwan. Maksud dukungan itu sangat jelas, yaitu membendung agar Revolusi Komunis tidak tersebar ke seluruh dunia.

Taiwan dijadikan alat untuk mencapai tujuan itu dengan gelontoran bantuan luar negeri yang mencapai jutaan dolar AS. Perang Korea yang pecah pada 25 Juni 1950 merupakan momentum keterlibatan langsung AS dalam mengamankan Taiwan. Perang yang berlangsung hingga 1953 itu membuat AS mengubah strateginya di Selat Taiwan. AS yang semula pasif berubah menjadi aktif karena khawatir keterlibatan Tiongkok mendorong semakin tersebar ideologi komunis. AS juga khawatir Perang Korea berakibat pada agresifitas Tiongkok untuk mengokupasi Taiwan. Karena itu, Presiden AS Harry Truman lantas mengerahkan Armada VII ke Selat Taiwan dan perbatasan Tiongkok-Korea. Tindakan tersebut dipandang Tiongkok sebagai invasi terhadap wilayah teritorialnya sehingga pemerintahan Komunis lantas mengirimkan tentaranya ke Korea. Menyikapi hal itu, pada 8 Desember 1950, AS mengumumkan embargo ekonomi kepada Tiongkok yang baru berakhir pada 1971.

Bantuan AS semakin menguatkan stabilitas ekonomi sekaligus legitimasi pemerintahan Nasionalis di masa awal kepindahannya ke Taiwan. Pada 1951-1965, AS menyalurkan bantuan finansial sebesar 100 juta USD kepada Taiwan setiap tahunnya. Melalui bantuannya itu, AS berperan besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi Taiwan sekaligus menancapkan pengaruhnya di negara ini. Keeratan hubungan Taiwan dan AS semakin dimantapkan oleh penandatanganan Mutual Defense Treaty pada Desember 1954 yang membuat Taiwan amat tergantung pada AS di satu sisi, dan mendorong AS semakin terlibat dalam konflik Selat Taiwan di sisi lain.

Tiongkok menuduh perjanjian pertahanan AS-Taiwan yang menempatkan Taiwan dalam proteksi AS sebagai invasi atas wilayah teritorial Tiongkok dan sebuah skenario untuk memisahkan Taiwan dari Tiongkok secara permanen. Pada 1970-an dan 1980-an, AS mengubah strateginya dengan mendekat ke Tiongkok untuk mengimbangi Uni Soviet yang sedang dihadapi dalam Perang Dingin. Setelah Soviet runtuh, mulai awal 1990-an AS kembali memanfaatkan Taiwan untuk menangkai kebangkitan Tiongkok. Meski demikian,

hingga kini, kedua belah pihak tetap menjaga kondisi status quo dengan tidak mengembangkan permusuhan di antara mereka menjadi perang terbuka.

Buktinya tampak dari perjalanan dinamika hubungan Tiongkok-AS pada tahun-tahun berikutnya. Sepanjang tahun 1970-an, AS di bawah pemerintahan Richard Nixon (1969-1974) dan Jimmy Carter (1977-1981) mulai mengesampingkan isu Taiwan dan memutuskan untuk mendekati China guna membendung pengaruh Soviet dalam Perang Dingin. Dalam suatu kesempatan, Nixon bahkan pernah mengatakan: “*good relationship with China were more important than good relationship with Soviet Union*”. Karena itu, setelah kursi Tiongkok di Dewan Keamanan PBB yang diduduki pemerintahan Nasionalis diambil alih pemerintahan Komunis pada 1971, AS mengalihkan kedaulatannya dari Taipei ke Beijing. Dukungan AS atas kedaulatan RRC diperlihatkan Nixon dalam kunjungannya ke Beijing pada 1972.

Kunjungan bersejarah itu menghasilkan kesepakatan Shanghai Communique yang salah satu klausulnya menyatakan “*the United States acknowledges that all Chinese on either side of the Taiwan Strait maintain there is but one China and that Taiwan is a part of China*”. Puncak perbaikan hubungan Tiongkok-AS terjadi pada 1979 ketika kedua negara sepakat untuk menormalisasi hubungan. Isu Taiwan tetap menjadi ganjalan hubungan Tiongkok-AS. Apalagi, manakala pemerintah AS menormalisasi hubungan dengan Tiongkok pada 1979, Kongres AS mengimbangnya dengan mengesahkan Taiwan Relations Act (TRA) pada 10 April tahun yang sama.

Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa “*Washington would maintain the capacity of the United States to resist any resort to force or other forms of coercion that would jeopardize the security, or the social or economic system, of the people on Taiwan*” (TRA 1979). Kebijakan inilah yang menjadikan isu Taiwan semakin rumit dan kompleks karena di satu sisi AS mengakui *one-China policy* sesuai Shanghai Communique, tetapi di sisi lain AS berkewajiban melindungi Taiwan berdasarkan amanat TRA. Menyikapi pengesahan TRA, Tiongkok menyampaikan keberatannya dan mempertanyakan komitmen AS. Meski marah, namun Beijing tetap menjaga diri untuk tidak memperkeruh situasi berubah menjadi konflik terbuka.

Kebijakan Reagan yang pro-Taiwan dilanjutkan oleh penggantinya, George H.W. Bush (1989-1993), dengan mempersenjatai militer Taiwan. Setelah Perang Dingin, AS semakin gencar menjual senjata ke negara ini. Tercatat sepanjang tahun 1990-2007, AS berperan besar dalam memperkuat kapabilitas tentara Taiwan untuk mengontrol tidak hanya Selat Taiwan, tetapi juga *Taiwanese Air Defense Identification Zone (TADIZ)*. Pada periode yang sama, proses demokratisasi yang mulai digerakkan Presiden Lee mendorong semakin menguatnya gerakan prokemerdekaan di Taiwan.

Karena itu, AS pun kian kokoh menyokong Taiwan sehingga hubungan keduanya bertambah erat. Wujud keeratannya itu tampak dari kunjungan Lee ke AS untuk berpidato di almamaternya, Cornell University, pada 7 Juni 1996. Sepanjang sejarah, inilah kunjungan pertama seorang presiden Taiwan ke AS. Dalam pidatonya, Lee mendesak Tiongkok untuk mengikuti model demokrasi yang dikembangkan Taiwan. Doktor ekonomi pertanian lulusan Cornell University (1968) itu juga menegaskan bahwa Taiwan adalah negara berdaulat, bukan sekadar penerus Dinasti Qing yang ditumbangkan kaum Nasionalis pada 1911.

Tiongkok mereaksi kunjungan Lee ke AS dengan kemarahan besar. Beijing menuduh pemerintahan Bill Clinton (1993-200) sengaja memanfaatkan Taiwan untuk melemahkan China, baik secara politik, maupun secara ekonomi.

Tiongkok lantas menarik duta besarnya dari AS, membatalkan kunjungan kenegaraan menteri pertahanannya ke Washington, menunda pertemuan tentang kontrol senjata dengan delegasi AS, mengakhiri dialog lintasselat, dan menolak menyetujui duta besar AS yang baru. Yang paling menegangkan, Tiongkok mengerahkan kekuatan militer ke Selat Taiwan yang berimbas pada krisis di kawasan ini. Dengan sigap, AS mengirimkan dua kapal perang untuk melindungi Taiwan. Perang memang tidak terjadi, tetapi ketegangan di Selat Taiwan itu mencerminkan disharmoni dalam keharmonisan relasi Tiongkok-AS. Tindakan AS tampaknya sekadar ditujukan sebagai pesan simbolik kepada Tiongkok bahwa: (1) AS konsisten mempertahankan eksistensi Taiwan melalui penguatan angkatan perangnya, dan (2) Taiwan adalah mitra strategis AS untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mengamankan kepentingan negara ini di Pasifik Barat.

Menyadari bahaya atas intervensi AS, pasca 1996, Tiongkok mengakselerasi modernisasi persenjataannya dengan menempatkan Taiwan sebagai target utama. Tiongkok juga beralih dari strategi deterrent ke coercive. Pembelian perlengkapan perang dari Rusia juga semakin ditingkatkan. Pada saat bersamaan, penjualan senjata AS ke Taiwan juga semakin meningkat. AS berkomitmen memperkuat militer Taiwan agar mampu mempertahankan dirinya sendiri dari kemungkinan serangan Tiongkok dan supaya Taipei memiliki kepercayaan diri tinggi dalam bernegosiasi dengan Beijing. Sembari bersiaga di Selat Taiwan, Tiongkok mulai mengembangkan hubungan lebih istimewa dengan AS melalui konsepsi “*new type of great power relations*” yang diluncurkan pada Oktober 2009.

Sejalan dengan pola hubungan baru yang saling menguntungkan itu, pada Februari 2012, Wakil Presiden Xi Jinping mengunjungi AS dan menyatakan “*China and the United States should establish a ‘new type of great power relations’ which is unprecedented and informs the future.*” Tiga bulan kemudian, dalam The Fourth U.S.-China Strategic and Economic Dialogue (S&ED), Presiden Hu Jintao menyebut “*advance mutually beneficial*” dan “*win-win cooperation*” sebagai pilar dari “*new type of great power relations*”.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Barack Obama pada Juni 2013, Xi yang telah menggantikan Hu sebagai presiden merangkum substansi “*new type of great power relations*” dalam tiga konsep: (1) *neither a confrontation nor conflict*, (2) *mutual respect*, dan (3) *win-win cooperation* (Lu 2022, 55). Meskipun demikian, niat baik China untuk mengembangkan pola baru relasi yang lebih istimewa tidak menyurutkan langkah AS untuk terus mempersenjatai Taiwan. Pada Januari 2010, AS menjual paket persenjataan senilai 6,4 miliar USD kepada Taiwan.

Paket itu termasuk 60 helikopter Black hawk, 114 rudal Patriot, sepasang kapal pemburu, dan sistem komunisasi persenjataan canggih. AS menegaskan bahwa transfer persenjataan itu merupakan wujud jelas dari komitmen pemerintahan Obama untuk melaksanakan perjanjian TRA dengan menyediakan senjata pertahanan diri yang dibutuhkan oleh Taiwan. Menyikapi hal itu, China mengekspresikan kemarahannya. Wakil Menteri Luar Negeri He Yefei menuding penjualan senjata itu sebagai “*rude interference in China’s internal affairs, severely endangering China’s national security.*” Sebaliknya, Juru Bicara

Kementerian Luar Negeri AS, P.J. Crowley, mengatakan: *“We think this action is consistent with the U.S. one-China policy ... and contributes to maintaining stability and security across the Taiwan Strait”* (CNN 2010). Pada September 2011, AS dan Taiwan menyepakati paket modernisasi pesawat F-16 sebesar 5,9 miliar USD. Bagi AS, penjualan senjata itu akan meningkatkan *“survivability, reliability and combat capability”* tentara Taiwan. AS percaya tindakan itu akan berkontribusi bagi stabilitas Selat Taiwan (Financial Times 2011).

Walaupun demikian, Wakil Perdana Menteri China, Zhang Zhijun, memprotesnya dengan keras. Seperti dikutip The Washington Post (22 September 2011), Zhang menyatakan: *“The wrongdoing by the US side will inevitably undermine bilateral relations as well as exchanges and co-operation in military and security areas.”* Dia menambahkan bahwa *“China strongly urges the US to be fully aware of the high sensitivity and serious harm of the issue, seriously treat the solemn stance of China, honour its commitment and immediately cancel the wrong decision.”*

Ke depan, AS kemungkinan akan terus mengirimkan senjata ke Taiwan tanpa mempedulikan keberatan dari China. AS sepertinya mencoba mempertahankan status quo sambil mengeruk keuntungan dari persoalan yang sedang mengemuka di Selat Taiwan. Di satu sisi, AS mendukung perkembangan politik Taiwan seraya meraup uang dari hasil penjualan senjata untuk menangkai kebangkitan pesat China. Di sisi lain, AS ingin memelihara perdamaian di Asia dengan menghindari perang aktual di Selat Taiwan. Sejauh ini, AS berhasil menyeimbangkan dua tujuan itu. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, konflik yang berujung perang besar di Asia bisa saja terjadi.

KESIMPULAN

Dalam konteks hubungan Tiongkok-Taiwan, AS disini melihat Tiongkok sebagai *Major Threat* bagi keamanan di Asia Pasifik. Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, AS mengurangi kehadirannya di Asia Pasifik dengan cara mengedepankan peranan sekutu-sekutunya dan membangun konstruksi keseimbangan strategis yang dilandaskan pada keberadaan sekutu-sekutunya di kawasan. AS menilai bahwa situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik relatif tidak mengancam kepentingan-kepentingan AS. Namun perkembangan kawasan Asia Pasifik yang sangat dinamis menyebabkan AS kembali memperhatikan kawasan itu dengan serius. Perkembangan signifikan terjadi di negara-negara kawasan Asia Pasifik.

Perbedaan kepentingan dan orientasi politik antara AS dan China memungkinkan terjadinya konflik antarkedua negara. Berdasarkan pertimbangan di atas, Amerika Serikat merasa perlu untuk menjaga stabilitas wilayah Asia Pasifik umumnya dan Taiwan khususnya. Konflik penyeberangan di selat Taiwan antara Tiongkok-Taiwan terjadi pertama kali pada tahun 1954-1955, krisis penyeberangan Selat Taiwan kedua terjadi pada tahun 1958 Krisis selat Taiwan juga terjadi pada tahun tahun 1962. Pada krisis pertama RRC menyerang Republik China yang pada saat itu berada di Kepulauan Yijiangshan, dan memaksa Republik China untuk meninggalkan Kepulauan Tachen, yang pada akhirnya RRC berhasil menguasai wilayah tersebut. Amerika Serikat, yang memang tak menyukai rezim komunis China bersekutu dengan Uni Soviet (Rusia) yang menjadi musuh AS saat perang dingin, melihat begitu besarnya pengaruh China akhirnya memutuskan untuk bersekutu dengan Republik

